Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan 2020 Disahkan Jadi Perda

Jumat, 2 Juli 2021

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2020 telah disahkan menjadi Perda. Pengesahan tersebut dilakukan melalui Sidang Paripurna yang digelar secara virtual pada Kamis (01/07/2021). Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, menandatangani berita acara pengesahan.

Bupati Irsyad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan atas terselenggaranya pembahasan Raperda dengan baik sesuai rencana. Ia juga menekankan bahwa persetujuan Raperda menjadi Perda sangat berarti bagi Pemkab Pasuruan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Irsyad juga menyampaikan terima kasih atas saran, kritik, dan masukan yang diberikan oleh anggota dewan. Ia memandang hal tersebut sebagai masukan berharga untuk meningkatkan kinerja OPD di masa mendatang. Sebelum disahkan menjadi Perda, semua Komisi memberikan kritik, saran, dan masukan kepada OPD di lingkup Pemkab Pasuruan.

Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Pasuruan dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.